

BAB V

KESIMPULAN

Pernikahan anak adalah perkawinan formal atau *union* dimana salah satu atau kedua dari pihak yang terlibat adalah anak-anak. *United Nations Convention on the Rights of the Child* (UNCRC) menetapkan bahwa yang disebut sebagai anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun. Pernikahan anak masih banyak dilakukan di beberapa negara, terutama negara-negara berkembang seperti Pakistan. Secara umum, faktor pendorong praktik pernikahan anak adalah ketidaksetaraan gender, tradisi, kemiskinan, dan rendahnya tingkat pendidikan. Praktik ini lebih banyak dialami oleh anak perempuan karena adanya pandangan bahwa perempuan lebih inferior dibandingkan laki-laki. Tak jarang pula perempuan dianggap sebagai objek yang ditransaksikan untuk mengurangi beban ekonomi keluarga.

Sebagai salah satu negara di dunia dengan tingkat prevalensi pernikahan anak yang tinggi, Pakistan telah mengupayakan berbagai usaha untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah dengan menandatangani dan meratifikasi UNCRC. Tak hanya itu, keseriusan Pakistan dan negara-negara Asia Selatan lainnya mengenai isu pernikahan anak ditunjukkan dengan disahkannya *SAARC Convention on Regional Arrangements for the Promotion of Child Welfare in South Asia (Regional Arrangements)* dan dibentuknya *South Asia Initiative to End Violence Against Children (SAIEVAC)*. SAIEVAC merupakan satu-satunya organisasi regional Asia Selatan di bawah SAARC yang memiliki mandat untuk

menangani masalah kekerasan terhadap anak dengan 5 area tematik, pernikahan anak, pekerja anak, perdagangan anak, hukuman fisik, serta kekerasan seksual dan eksploitasi. Untuk mengatasi pernikahan anak, SAIEVAC memiliki mekanisme yang disebut sebagai *Regional Action Plan to End Child Marriage (2015-2018)* (RAP) yang secara umum bertujuan untuk menunda pernikahan anak perempuan dengan meningkatkan usia minimal pernikahan untuk anak perempuan menjadi 18 tahun. Dengan demikian, timbul pertanyaan penelitian “bagaimana upaya SAIEVAC dalam mengatasi isu pernikahan anak melalui pelaksanaan *Regional Action Plan to End Child Marriage (2015-2018)* di Pakistan?”

Neoliberalisme Insitutionalis berpendapat bahwa kerja sama memungkinkan ketika prinsip-prinsip dan harapan dari tiap negara bertumpu pada satu isu tertentu. Pada prinsipnya, SAIEVAC sudah memenuhi kriteria tersebut melihat terfokusnya isu yang menjadi perhatian utama SAIEVAC, yaitu kekerasan terhadap anak. Melalui RAP, SAIEVAC pun sudah menjalankan fungsi organisasi internasional yaitu sebagai pengumpul informasi dan pemantau, forum, pemantau pelaksanaan hukum, dan penyedia sumber daya serta bantuan teknis. Dengan demikian, implementasi RAP oleh SAIEVAC sudah sesuai dengan teori Neoliberalisme Insitutional dan fungsi organisasi internasional dari Karns dan Mingst.

RAP memiliki beberapa bentuk aktivitas yaitu pengkajian, konsultasi, kemitraan, advokasi, dan pemantauan. Dalam melakukan fungsinya, SAIEVAC secara umum lebih melakukan kegiatan ‘di balik layar’ dari RAP. Kegiatan tersebut diantaranya seperti melakukan penelitian, melaksanakan forum-forum atau

konsultasi, penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU), dan lainnya. Kegiatan yang bersifat akar rumput didelegasikan kepada mitra-mitra seperti *Non Governmental Organization* (NGO), *Civil Society Organization* (CSO), atau badan-badan lain. Maka dari itu, untuk melihat upaya-upaya pada tingkat akar rumput, penelitian ini melihat pula program-program maupun aktivitas di Pakistan dalam pembagian waktu sebelum, saat, dan setelah pernikahan anak terjadi untuk melihat apakah semua aspek pernikahan anak mendapatkan perhatian dari SAIEVAC dan mitranya.

Aktivitas yang dilakukan untuk mengatasi terjadinya pernikahan anak utamanya adalah pencatatan kelahiran dan pernikahan, aturan yang berpihak terhadap anak mengenai usia minimal untuk menikah, pendidikan bagi anak perempuan maupun komunitas mengenai pentingnya meninggalkan praktik pernikahan anak, serta partisipasi dari komunitas untuk mendorong pencegahan praktik pernikahan anak. Terdapat sebuah program inovatif yang menggunakan teknologi agar pencatatan kelahiran dan pernikahan di daerah-daerah yang terpencil menjadi lebih mudah. Selain itu terdapat pula program pendidikan yang menargetkan anak-anak putus sekolah serta *network* bagi para pemimpin agama di Pakistan. Keterlibatan pemimpin agama dianggap vital karena besarnya pengaruh mereka terhadap cara pandang maupun kehidupan sehari-hari masyarakat Pakistan. Namun pada pelaksanaannya belum ada *network* pemimpin agama yang secara khusus membahas mengenai anjuran untuk tidak melakukan pernikahan anak.

Aktivitas bagi anak perempuan yang terikat pernikahan diantaranya adalah penyediaan akses terhadap pelayanan kesehatan dan informasi mengenai kesehatan

seksual dan reproduksi, keluarga berencana, serta perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga. Terdapat beberapa program yang menyediakan pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi serta keluarga berencana yang membawa hasil positif. Namun aspek perlindungan terhadap kekerasan bagi anak yang menikah masih kurang diperhatikan. Hal ini demikian karena kurangnya program-program yang secara khusus memperhatikan kekerasan yang dialami anak perempuan yang terikat dalam pernikahan. Hal ini didorong oleh adanya pandangan bahwa urusan rumah tangga adalah wilayah privat. Ditambah pula dengan adanya aturan perceraian yang membatasi kebebasan anak perempuan untuk bisa menggugat cerai suami.

Bagi anak perempuan yang telah keluar dari ikatan pernikahan, diharapkan adanya aktivitas yang mengakomodasi anak perempuan seperti pembangunan kapasitas untuk dapat kembali berintegrasi dengan komunitas dan menjadi bagian dari komunitas yang aktif serta tidak bergantung pada orang lain selain kemampuan sendiri. Namun tidak banyak program yang secara khusus memperhatikan kebutuhan anak perempuan pada tahap ini. Salah satu penyebabnya adalah kecilnya angka perceraian atau perpisahan dari anak perempuan yang menikah dini. Terdapat pula beberapa hambatan yang menghalangi upaya SAIEVAC beserta mitranya untuk menjalankan RAP secara keseluruhan di Pakistan, seperti lingkungan politik Pakistan yang kurang mendukung penegakan hak-hak perempuan dan anak serta isu regional yang mengganggu berjalannya kegiatan multilateral Asia Selatan.

Dapat disimpulkan bahwa aktivitas yang dilakukan oleh SAIEVAC beserta mitranya di Pakistan secara keseluruhan telah menghasilkan beberapa perubahan

positif, seperti berkurangnya jumlah anak perempuan yang menikah dini meskipun dalam angka yang marginal. Meskipun begitu, terdapat beberapa tantangan dari tingkat nasional maupun regional yang menghambat upaya-upaya yang dilakukan sehingga pengaruh yang ditimbulkan oleh RAP dapat dikatakan moderat. Selain itu advokasi maupun dorongan terhadap pemerintah Pakistan untuk meningkatkan usia minimal menikah untuk perempuan menjadi 18 tahun pun belum berhasil dicapai. Namun perlu ditunjukkan apresiasi kepada SAARC maupun SAIEVAC dalam keseriusannya untuk mengatasi masalah pernikahan anak di Pakistan melalui intensi untuk melanjutkan RAP. Hal ini ditunjukkan dengan telah dilakukannya pertemuan yang memformulasikan komponen-komponen *Regional Action Plan to End Child Marriage (2018-2023)*.

DAFTAR PUSTAKA

- AFPPD. *AFPPD Annual Report 2016*. Bangkok: AFPPD, 2017.
- Asian Forum for Human Rights and Development. *SAARC and Human Rights: Looking Back and Ways Forward*. Bangkok: Asian Forum for Human Rights and Development, 2012.
- Babar, Farhatullah. "Does Pakistan really need the Council of Islamic Ideology?" *The Friday Times*, Mei 10, 2019. Diakses pada November 29, 2019. <https://www.thefridaytimes.com/does-pakistan-really-need-the-council-of-islamic-ideology/>.
- Center for Communication Programs Pakistan. "Networks." Diakses pada Desember 3, 2019. <http://ccp-pakistan.org.pk/resources/networks/>.
- Center for Reproductive Rights. *Child Marriage in South Asia: International and Constitutional Legal Standards and Jurisprudence for Promoting Accountability and Change*. New York: Center for Reproductive Rights, 2013.
- Child Marriage Restraint Act 1929.
- Child Marriage Restraint (Amendment) Act 2009.
- Child Marriage Restraint (Amendment) Act 2019.
- Child Protection & Welfare Bureau Punjab. "Child Protection Unit." Diakses pada Desember 5, 2019. https://cpwb.punjab.gov.pk/functional_unit.
- "Helpline." Diakses pada Desember 5, 2019. <https://cpwb.punjab.gov.pk/helpline>.
- Children's Rights Alliance. "The United Nations Convention on the Rights of the Child." Diakses pada Februari 20, 2019. <https://www.childrensrights.ie/childrens-rights-ireland/un-convention-rights-child>.
- Civil Society Asia. "NACG Regional Workshop and Training on Advocacy and Lobbying to Counter Child Sexual Abuse and Commercial Sexual Exploitation of Children in South Asia." Desember 31, 2015. Diakses pada Desember 2, 2019. <http://www.civilsocietyasia.org/resources/NACG%20Workshop%20and%20Training%20>.
- Colombo Statement on Children of South Asia, 2009.
- Council of Islamic Ideology Pakistan. "Introduction." Diakses pada November 29, 2019. <http://cii.gov.pk/aboutcii/Introduction.aspx>.
- "Present Council." Diakses pada November 29, 2019. <http://www.cii.gov.pk/aboutcii/presentcouncil.aspx>.

- Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches*. Thousand Oaks: SAGE Publications Inc., 2014.
- Family Planning 2020. "New family planning 2019-2024 national action plan in Pakistan helps reach women and girls." November 11, 2019. Diakses pada Desember 5, 2019. <http://www.familyplanning2020.org/news/new-family-planning-2019-2024-national-action-plan-pakistan-helps-reach-women-and-girls>.
- Freeman, Michael. "The Human Rights of Children." *Current Legal Problems* 63, No. 1 (2010): 1-44.
- Girls Not Brides. "Atlas." Diakses pada Februari 17, 2019. [https://www.girlsnotbrides.org/where-does-it-happen/#/](https://www.girlsnotbrides.org/where-does-it-happen/atlas/#/).
- "Child Marriage Around the World." Diakses pada Februari 17, 2019. <https://www.girlsnotbrides.org/where-does-it-happen/>.
- "Pakistan." Diakses pada November 8, 2019. <https://www.girlsnotbrides.org/child-marriage/pakistan/>.
- "Why Does Child Marriage Happen?" Diakses pada Februari 17, 2019. <https://www.girlsnotbrides.org/why-does-it-happen/>.
- Group Development Pakistan. *Annual Activity Report 2014-2015*. Islamabad: Group Development Pakistan, 2015.
- *Annual Activity Report 2016*. Islamabad: Group Development Pakistan, 2016.
- *Annual Report 2017*. Islamabad: Group Development Pakistan, 2017.
- GSM Association. *Roadmap for Digital Birth Registration: Insights on Scale and Sustainability from Pakistan*. London: GSM Association, 2018.
- Gulzar, Shazia, Muhammad Nauman, Farhan Yahya, Shagafat Ali, dan Mariam Yaqoob. "Dowry System in Pakistan." *Asian Economic and Financial Review* 2, No.7 (2012): 784-794.
- Hayat, Arif. "KP Assembly approves landmark bill merging Fata with province." *Dawn*, diperbaharui Mei 27, 2019. Diakses pada November 5, 2019. <https://www.dawn.com/news/1410351>.
- Human Rights Council. National report submitted in accordance with paragraph 5 of the annex to Human Rights Council Resolution 16/21* Pakistan. 2017.
- Human Rights Watch. "Pakistan: Government Shuttters International Groups." Desember 16, 2017. Diakses pada November 28, 2019. <https://www.hrw.org/news/2017/12/16/pakistan-government-shuttters-international-groups>.
- "World Report 2019: Pakistan." Diakses pada Desember 4, 2019. <https://www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/pakistan>.

- ILO. "Terms of References." 2010. Diakses pada September 14, 2019. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---sro-new_delhi/documents/genericdocument/wcms_300828.pdf.
- International Planned Parenthood Federation. *Ending Child Marriage: A Guide for Global Policy Action*. London: IPPF, 2003.
- Jabeen, Tahira. "A History of Contemporary Child Protection in the Global South (With A Special Focus on South Asia and Pakistan)." *Journal of the Research Society of Pakistan* 50, No. 2 (2013): 138-159.
- "Child Protection Legislation in Pakistan: Bringing International Child Rights Obligations and Local Values Together." *Pakistan Journal of Criminology* 8, No. 3 (2016): 16-33.
- "Pakistan's Child Protection Legislative and Policy Frameworks: A Critical Review." *Pakistan Journal of Criminology* 5, no. 2 (2013): 159-180.
- Jackson, Robert dan Georg Sorensen. *Introduction to International Relations: Theories and Approaches*. Oxford: Oxford University Press, 2013.
- Jensen, Robert dan Rebecca Thornton. "Early Female Marriage in the Developing World." *Gender and Development* 11, No. 2 (2003): 9-19.
- LEAD Pakistan. "Sawara - A Settling of Scores." Diakses pada November 8, 2019. http://lead.org.pk/hr/attachments/Compendium/01_Civil_Political_Rights/Sawara.pdf.
- Karns, Margaret P., Karen A. Mingst, dan Kendall W. Stiles. *International Organizations: The Politics and Processes of Global Governance*. Colorado: Lynne Rienner Publisher, 2013.
- Kathmandu Declaration. Diakses pada Desember 3, 2019. <https://www.afppd.org/events/event-docs/11-kathmandu-declaration-dec.pdf>.
- Kementerian Dalam Negeri Pakistan. *Policy for regulation of International Non-governmental Organizations (INGOs) in Pakistan*. Diakses pada November 28, 2019. <http://www.icnl.org/research/library/files/Pakistan/INGOPOLICY.pdf>.
- Kumar, Hari dan Geeta Anand. "17 Indian Soldiers Killed by Militants in Kashmir." *The New York Times*. September 18, 2016. Diakses pada November 30, 2019. <https://www.nytimes.com/2016/09/19/world/asia/17-indian-soldiers-killed-by-militants-in-kashmir.html>
- Malanczuk, Peter. *Akehurst's Modern Introduction to International Law*. New York: Routledge, 1997.
- Madadgaar. "Helpline." Diakses pada Desember 5, 2019. <http://madadgaar.org/helpline/>.
- Malik, A. Sami. "Boosting birth registration in Pakistan with mobile phones." *UNICEF*, April 1, 2016. Diakses pada November 14, 2019.

- <https://www.unicef.org/stories/boosting-birth-registration-pakistan-mobile-phones>.
- Ministry of Human Rights Pakistan. "NCCWD." Diakses pada Desember 5, 2019. http://www.mohr.gov.pk/index.php/home/pps_page/18.
- Ministry of National Health Services Regulations & Coordination. *National Vision 2016-2025 for Coordinated Priority Actions to Address Challenges of Reproductive, Maternal, Newborn, Child Adolescent Health and Nutrition*. Islamabad: Ministry of National Health Services Regulations & Coordination, 2016.
- Nasreen, Shagufta, Aliyah Ali, dan Nasreen Aslam Shah. "Child Marriage: Changing Trends in Pakistan,." *New Horizons* 12, No. 1 (2018): 85-98.
- Nasrullah, Muazzam. "Child Marriage and Its Impact on Maternal and Child Health in Pakistan." PhD diss., University of Bielefeld, 2015.
- Nasrullah, Muazzam, Sana Muazzam, Zulfiqar A. Bthutta, dan Anita Raj. "Girl Child Marriage and Its Effect on Fertility in Pakistan: Findings from Pakistan Demographic and Health Survey, 2006-2007." *Matern Child Health Journal* 18, No. 3 (2014): 534-543.
- National Institute of Population Studies Islamabad. *Pakistan Demographic and Health Survey 2017-18*. Rockville: NIPS dan ICF, 2019.
- National Institute of Population Studies Islamabad. *Pakistan Demographic and Health Survey 2006-2007*. Islamabad: Macro International Inc., 2008.
- *Pakistan Demographic Survey 2012-2013*. Islamabad dan Calverton: ICF International, 2013.
- *Pakistan Demographic Survey 2017-2018*. Islamabad dan Rockville: NIPS dan ICF, 2019.
- Naveed, Sofia dan Khalid Manzoor Butt. "Causes and Consequences of Child Marriages in South Asia: Pakistan's Perspective." *South Asian Studies* 30, No. 2 (2015): 161-175.
- Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. "Digital record of the UDHR." Februari 2009. Diakses pada Maret 1, 2019. <https://www.ohchr.org/EN/NEWSEVENTS/Pages/DigitalrecordoftheUDHR.aspx>.
- "The United Nations Study on Violence against Children." Diakses pada September 11, 2019. <https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Study/Pages/StudyViolenceChildren.aspx>.
- OHCHR. "Convention on the Rights of the Child." Diakses pada Februari 17, 2019. <https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx>.
- ONCC. *The State of Children in Pakistan*. Islamabad: ONCC, 2015.
- Pakistan Constitution 1973

- Pakistan Penal Code 1860.
- Paris, Roland. "Human Security." Dalam *Security Studies: A Reader*, diedit oleh Christopher W. Hughes dan Lai Yew Meng, 71-79. Oxon: Routledge, 2011.
- Plan International Asia Regional Office. *Their Time is Now: Eliminating Child, Early and Forced Marriage in Asia*. Bangkok: Plan International, 2018.
- Population Welfare Department Punjab. "Functions." Diakses pada Desember 5, 2019. <https://pwd.punjab.gov.pk/functions>.
- Protection of Women (Criminal Laws Amendment) Act 2006.
- Pro Pakistani. "Telenor's Digital Birth Registry & iChamp Recognized by Global Child Forum." Februari 20, 2019. Diakses pada Desember 2, 2019. <https://propakistani.pk/2019/02/20/telenors-digital-birth-registration-ichamp-recognized-by-global-child-forum/>.
- Pulla, Venkat. "Child protection system reform in the regional consultation of the South Asian nations." *The Malaysian Journal of Social Administration* 10, No. 1 (2017): 29-44.
- Punjab Child Marriage Restraint Act 2015.
- Rahnuma. *Annual Report 2018*. Lahore: Rahnuma, 2018.
- . "Organizational Profile." Diakses pada Desember 5, 2019. <https://fpapak.org/organizational-profile/>.
- Regional Action Plan to End Child Marriage (2015-2018).
- Research and Development Solutions. "Family Planning in Pakistan: An Overview." Januari, 2012. Diakses pada Desember 5, 2019. https://www.resdev.org/files/policy_brief/1/01fpoverview.pdf.
- SAARC Convention on Regional Arrangements for the Promotion of Child Welfare in South Asia, Kathmandu, Januari 2002.
- SAARC. "Charter of the South Asian Association for Regional Cooperation." Diakses pada September 13, 2019. <http://saarc-sec.org/saarc-charter>.
- . "Guidelines and Procedures for Granting Recognition by SAARC to Recognized Regional Apex Bodies." April 1992. Diakses pada September 13, 2019. http://saarc-sec.org/download/downloads/Guidelines_and_Rights_and_Obligations_of_SAARC_Apex_Bodies.pdf.
- SAARC Development Fund. *SDF Annual Report 2015*. Thimpu: SAARC Development Fund, 2015.
- Sabreen, Mudrasa. "Sawara Marriages and Related Legal Issues." *Islamabad Law Review* 1, No. 1 (2017): 39-63.
- SAIEVAC. *Report of 3rd Regional Convening on Accelerating Efforts to End Child Marriage in South Asia Through Joint Action with Regional and National Human Rights Institutions and Key Regional Partners*. Sri Lanka, 2018.

- *Report Regional Consultation SDG Alliance 8.7 – South Asian Launch 19-20 July 2016*. Kathmandu: SAIEVAC Regional Secretariat, 2016.
- “Core Partners.” Diakses pada September 9, 2019. <http://saievac.org/about-saievac/core-partners/>.
- “History.” Diakses pada September 9, 2019. <http://saievac.org/about-saievac/history/>.
- “Kathmandu Call for Action to End Child Marriage in South Asia.” Diakses pada September 17, 2019. https://www.girlsnotbrides.org/wp-content/uploads/2018/01/SA-End-Child-Marriage-Brochure_20Nov14final-2-1.pdf.
- “Mission Statement.” Diakses pada September 9, 2019. <http://saievac.org/about-saievac/mission-statement/>.
- “SAIEVAC Mechanism.” Diakses pada September 12, 2019. <http://saievac.org/about-saievac/saievac-mechanism/>.
- “Technical Consultation Meetings.” Diakses pada September 12, 2019. <http://saievac.org/our-work-2/technical-consultation-meetings/>.
- “Terms of Reference for Civil Society Organisations.” Diakses pada September 14, 2019. <http://binits.com.np/saievac/wp-content/uploads/2011/12/Civil-Society-Organisations-TOR.pdf>
- “Terms of Reference for the Regional Child Participation Network.” Diakses pada September 14, 2019. <http://saievac.org/wp-content/uploads/2011/12/Regional-Child-Participation-Network-TOR.doc>.
- “Terms of Reference for the SAIEVAC Governing Board.” Diakses pada September 14, 2019. <http://saievac.org/wp-content/uploads/2011/12/Governing-Board-TOR.doc>.
- “Thematic Areas.” Diakses pada September 9, 2019. <http://saievac.org/our-work-2/thematic-areas/>.
- Sindh Child Marriage Restraint Act 2013.
- Special Marriage Act 1872.
- Sterling-Folker, Jennifer. “Neoliberalism.” Dalam *International Relation Theories: Discipline and Diversity*, diedit oleh Tim Dunne, Milja Kurki, dan Steve Smith, 114-131. Oxford:Oxford University Press, 2013.
- Tahirih Justice Center. “Forced Marriage Overseas: Pakistan.” Diakses pada Januari 2, 2020. <https://preventforcedmarriage.org/forced-marriage-overseas-pakistan/>.
- The Dissolution of Muslim Marriage Act 1939.
- The Population Council. *Youth in Pakistan: Priorities, Realities and Policy Responses*. Islamabad: Population Council, 2016.

- The Punjab Commission on the Status of Women. "Punjab Marriage Restraint (Amendment) Act 2015." Diakses pada Maret 25, 2019. https://pcsw.punjab.gov.pk/child_marriage.
- The Sindh Marriages Restraint Act 2013.
- UNICEF. *Child Marriage: Latest trends and future prospects*. New York: UNICEF, 2018.
- *Ending Child Marriage: Progress and Prospects*. New York: UNICEF, 2014.
- "Digital Birth Registration helps make Pakistan a safer place for children." Maret 29, 2019. Diakses pada Desember 2, 2019. <https://www.unicef.org/pakistan/stories/digital-birth-registration-helps-make-pakistan-safer-place-children>.
- "South Asia religious leaders for children." Diakses pada Desember 3, 2019. <https://www.unicef.org/rosa/what-we-do/south-asia-religious-leaders-children>.
- UNICEF dan UNFPA. *Mapping Child Marriage Initiatives in South Asia*. Bangkok: UNFPA, 2016.
- Universal Declaration of Human Rights.
- Upreti, Melissa. "Ending Child Marriage in South Asia: A Regional Action Plan." *Girls Not Brides*, Maret 14, 2016. Diakses pada Maret 3, 2019. <https://www.girlsnotbrides.org/child-marriage-south-asia-regional-plan/>.
- Viotti, Paul R. dan Mark V. Kauppi. *International Relations Theory*. New Jersey: Pearson, 2012.
- Wodon, Quentin, Chata Male, Ada Nayihouba, Adenike Onagoruwa, Aboudrahyme Savadogo, Ali Yedan, Jeff Edmeades, Aslihan Kes, Neetu John, Lydia Murithi, Mara Steinhaus, dan Suzanne Petroni. *Economic Impacts of Child Marriage: Global Synthesis Report*. Washington, DC.: World Bank dan ICRW, 2017.
- World Bank. "GDP (current US\$)." Diakses pada November 28, 2019. <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?end=2018&locations=PK&start=2010>.
- "Government expenditure on education, total (% of GDP) – Pakistan." Diakses pada November 28, 2019. <https://data.worldbank.org/indicator/SE.XPD.TOTL.GD.ZS?end=2017&locations=PK&start=2010>.
- Yousaf, Farhan Navid. "Human (in)Security in South Asia." *South Asian Studies* 32, no. 2 (2017): 477-493.
- Youth Policy. "Factsheets." Diakses pada Maret 3, 2019. <http://www.youthpolicy.org/factsheets/country/>.

- Zahra-Malik, Mehreen. "Regional SAARC summit postponed amid rising Pakistani-Indian tensions." *Reuters*. September 30, 2016. Diakses pada November 30, 2019. <https://www.reuters.com/article/us-pakistan-india/regional-saarc-summit-postponed-amid-rising-pakistani-indian-tensions-idUSKCN120252>.
- Zaman, Muhammad. "Exchange Marriage System and Muslim Family Laws in Pakistan." *Pakistan Journal of History and Culture* 33 No. 1 (2012): 1-12.
- . "Exchange Marriages in a Community of Pakistan: Adequate Social Exchange." *The Family Journal: Counseling and Therapy for Couples and Families* 22 No. 1 (2014): 69-77.
- "INGOs be told of reasons for their non-registration: Senate body." *Pakistan Today*, November 6, 2018. Diakses pada November 28, 2019. <https://www.pakistantoday.com.pk/2018/11/06/ingos-be-told-of-reasons-for-their-non-registration-senate-body/>.
- "Pakistan orders 18 foreign-funded NGOs out of country." *Deutsh Welle*. Oktober 4, 2018. Diakses pada November 28, 2019. <https://www.dw.com/en/pakistan-orders-18-foreign-funded-ngos-out-of-country/a-45761398>.